

Konservatisme Islam dan Intoleransi Keagamaan di Tasikmalaya

Amin Mudzakkir

P2SDR-LIPI, Jakarta

amin.mudzakkir@gmail.com

Artikel diterima 13 Maret, diseleksi 17 Mei, dan disetujui 8 Juni 2017

Abstrak

This paper observes Islamic conservatism and religious intolerance in Tasikmalaya. Based on historical analysis on the development and existence of Islam in Tasikmalaya, this paper looks at the symptoms of Islamic conservatism growing up at the end of 1990s which severely affected to the existence of Ahmadi and Shi'i as minority groups. Mainly relying on deep interviews with local actors, this paper argues that intolerance towards religious minority has been facilitated by the policy of the state which tends to give privilege to majority groups.

Keywords: Islam, Conservative, Intolerance, Ahmadiyah, Syiah, Tasikmalaya.

Abstrak

Tulisan ini mengkaji konservatisme Islam dan intoleransi keagamaan di Tasikmalaya. Berangkat dari analisis historis mengenai perkembangan dan kedudukan Islam dalam perkembangan Tasikmalaya, tulisan ini melihat bahwa gejala konservatisme Islam yang mengemuka sejak akhir 1990-an berdampak buruk terhadap eksistensi kelompok Ahmadiyah dan Syiah sebagai minoritas. Didasarkan terutama pada wawancara mendalam dengan aktor-aktor setempat, tulisan ini juga berpendapat bahwa intoleransi terhadap minoritas keagamaan difasilitasi oleh adanya kebijakan negara yang cenderung mengistimewakan kelompok mayoritas.

Kata kunci: Islam, Konservatif, Intoleransi, Ahmadiyah, Syiah, Tasikmalaya.

Pendahuluan

Sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru, karakter toleran yang dilekatkan kepada arus utama Islam Indonesia mendapatkan tantangan. Seiring dengan pergantian rezim, ekspresi keagamaan pun mengalami perubahan. Sekarang berbagai laporan memperlihatkan menguatnya sikap intoleran di kalangan Islam konservatif terhadap individu atau kelompok yang dianggap menyimpang, sehingga eksistensi berbagai kelompok minoritas, khususnya dalam Muslim sendiri, dipertanyakan (Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2016, Jakarta, 2016).

Martin van Bruinessen menyebut adanya gejala kembalinya arus konservatif (*conservative turn*) dalam perkembangan kontemporer Islam Indonesia (Martin van Bruinessen, *Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme*, 2014, 47).¹ Disebut kembali karena ia mempunyai akar sejarah yang cukup panjang. Dalam tulisan lain, dengan menggunakan istilah "Islam radikal", Bruinessen menunjuk Darul Islam (DI) dan Majelis Syuro

¹Istilah 'konservatif' mengacu pada beragam aliran yang menampik semua penafsiran yang modern, liberal, atau progresif atas ajaran Islam, dan berpegang teguh pada doktrin agama dan tatanan sosial yang mapan. Konservatif cenderung terkenal akan keberatannya terhadap gagasan kesetaraan gender dan penentangan terhadap kekuasaan, dan pendekatan hermeneutika moderat atas teks-teks agama".

Muslimin Indonesia (Masyumi) sebagai pewaris gejala tersebut (“Genealogies of Islamic radicalism in post-Suharto Indonesia”, *South East Asia Research*, 2002, 117-154). Sementara itu, Jeremy Menchik melihat gejala tersebut inheren dalam perjalanan nasionalisme Indonesia (Jeremy Menchik, *Islam and Democracy in Indonesia: Toleration without Liberalism*, 2016). Sejak awal gagasan toleransi yang berkembang dalam gerakan-gerakan Islam di Indonesia memang cenderung konservatif jika dilihat dari sudut pandang liberalisme. Toleransi yang berkembang di sini lebih menekankan keutuhan komunal daripada otonomi individual. Akibatnya toleransi dalam kenyataannya lebih merupakan retorika kaum mayoritas daripada kebebasan bagi kaum minoritas. Yang menarik adalah panggung bagi arus Islam konservatif sekarang tidak lagi hanya terpusat di Jakarta, tetapi menyebar di daerah-daerah seiring dengan demokratisasi setelah pemberlakuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Isu yang diusung pun tidak lagi hanya berkutat dengan dasar negara, tetapi juga meliputi aspek-aspek etik yang mengacu pada “syariah”. Seperti dikaji oleh Michael Buhler, aspirasi itu secara formal tidak lagi hanya bergantung pada partai-partai Islam, tetapi juga partai-partai sekuler yang membuka aliansi dengan kelompok-kelompok keagamaan (Michael Buehler, *The Politics of Shari’a Law: Islamist Activist and the State in Democratizing Indonesia*, 2016).

Salah satu daerah yang sekarang menjadi sorotan terkait konservatisme Islam dan intoleransi keagamaan adalah Tasikmalaya. Terkenal sebagai basis DI dan Masyumi pada masa lalu, Tasikmalaya adalah sebuah daerah di Jawa Barat yang belakangan populer karena adanya pemberlakuan “perda syariah” dan kehadiran organisasi-organisasi Islam radikal. Implikasi dari perkembangan ini mengena langsung pada keberadaan

kelompok minoritas dalam Islam sendiri, khususnya dalam hal ini adalah Ahmadiyah dan Syiah. Tidak hanya mengikuti fatwa dan keputusan di tingkat yang lebih atas, kedua kelompok tersebut dipermasalahkan karena dinilai mengganggu arus besar di dalam.

Sejauh ini Islam di Tasikmalaya sudah menjadi objek berbagai studi (Lihat Suismanto, *Perda Syariah Islam dan Problematikanya (Kasus Tasikmalaya)*, 2007; Ma’mun Murod Al-Barbasy, *Islam dan Negara: Perdebatan dalam Pembuatan Syariah Islam di Tasikmalaya*, 2016; Junaidi Simun, *Negara di Bawah Bayang Otoritas Agama: Problematika Peran Negara dalam Menangani Intoleransi Keagamaan (Studi Kasus di Jawa Barat)*, 2012). Meski demikian, sebagian besar studi yang fokus pada perkembangan mutakhir tersebut kurang memperhatikan aspek historisnya. Alih-alih perubahan, fenomena konservatisme dan intoleransi keagamaan di Tasikmalaya merupakan kelanjutan dari rangkaian-rangkaian peristiwa-peristiwa sebelumnya. Didasarkan pada observasi dan wawancara mendalam, tulisan ini mau memperlihatkan masalah itu melalui sistematika sebagai berikut. Bagian pertama menguraikan konteks Tasikmalaya secara singkat. Bagian kedua membahas konservatisme, asal-usulnya, dan ekspresinya di masa kini. Bagian ketiga mengkaji perda syariah akan dijadikan bahan diskusi sesudahnya. Bagian keempat menelaah implikasi perda syariah terhadap kelompok minoritas Ahmadiyah dan Syiah. Bagian akhir adalah kesimpulan dan penutup.

Konteks Tasikmalaya

Tasikmalaya yang dibicarakan dalam tulisan ini meliputi Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya. Keduanya secara administratif adalah bagian dari Propinsi Jawa Barat. Terletak di jalur selatan Pulau Jawa, berjarak ±

105 km dari Bandung dan ± 255 km dari Jakarta, Tasikmalaya menempati posisi strategis dalam lalu lintas ekonomi regional. Ia adalah pusat pertumbuhan di kawasan Priangan Timur yang meliputi Garut, Ciamis, Banjar, Pangandaran, dan Tasikmalaya sendiri.



Secara etnis mayoritas penduduk Tasikmalaya adalah orang Sunda dan beragama Islam. Hubungan antara etnisitas dan agama, antara Sunda dan Islam, ini sudah sedemikian melekat, sehingga terdapat kesan bahwa orang Sunda adalah Islam. Di Jawa Barat, hanya di beberapa daerah saja, di komunitas-komunitas tertentu, kita akan menemukan orang Sunda yang beragama non-Muslim. Di Tasikmalaya sendiri, kalangan non-Muslim umumnya adalah bukan orang Sunda. Sejauh pengamatan terhadap gereja-gereja dan kelenteng yang ada, mereka adalah keturunan Tionghoa, Jawa, dan Batak. Selain itu, ada juga sedikit penduduk keturunan Pakistan yang beragama Islam.

Dalam sejarah Indonesia, realitas etnis dipolitisasi sedemikian rupa sejak zaman kolonial. Oleh karena itu, meski pada dasarnya merupakan konstruksi sosial yang mengandung masalah, kategori antara pribumi dan non-Pribumi tetap digunakan sebagai salah satu pembeda dalam praktik sosial sehari-hari. Hal ini dikuatkan dengan segregasi geografis dan, terutama lagi, lahan sosial politik. Di Tasikmalaya, penduduk keturunan Tionghoa, misalnya, tinggal di perkotaan, di daerah Cihideng, Tawang, dan Cipedes, dan menguasai sentra-sentra pertokoan di kawasan itu.

Kondisi ini telah berlangsung setidaknya sejak awal abad ke-20 hingga sekarang. Sementara itu, beberapa pengusaha keturunan Pakistan, seperti Tuan Azad dan Tuan Servia, sangat eksis di bidang tekstil (toko kain). Oleh karena alasan-alasan keagamaan, mereka membangun aliansi yang cukup erat dengan para pengusaha pribumi Sunda yang bergerak di bidang serupa.

Sejak awal abad ke-20, Tasikmalaya telah berkembang sebagai pusat perekonomian pribumi. Khususnya memasuki akhir dekade 1930-an, dibantu oleh adanya insentif yang diberikan oleh pemerintah kolonial, di daerah ini lahir para pengusaha, umumnya berasal dari kalangan santri, yang bergerak terutama di bidang kerajinan tangan dan batik. Mereka mendirikan koperasi. Di antara yang paling terkenal adalah koperasi Mitra Payung dan Mitra Batik. Koperasi yang disebut terakhir ini berkembang pesat pada tahun 1950-an, mendirikan pabrik yang menghasilkan sendiri kain mori, sebelum merosot di era Orde Baru dan akhirnya kolaps menjelang krisis moneter 1998 (Amin Mudzakkir, *Kaum Santri Kota: Pengusaha, Perubahan Ekonomi, dan Islam di Kota Tasikmalaya, 1930-1980-an*, 2005).

Mengikuti pertumbuhan ekonomi, pergerakan-pergerakan sosial politik juga tumbur subur di daerah ini. Dalam peristiwa Cimareme, Garut, 1919 yang terkenal juga sebagai pemberontakan Sarekat Islam (SI) Afdelling B, beberapa haji terkemuka asal Tasikmalaya ikut terlibat. Salah satunya adalah Haji Ismail asal Manonjaya. Selain SI, berdiri pula cabang Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis) pada tahun 1920-an dengan pendukung utana para pedagang. NU muncul lebih belakangan, yaitu awal 1930-an, namun bukan sebagai respons terhadap gerakan Islam modernis sebagaimana dilaporkan oleh Deliar Noer, melainkan sebagai kritik

terhadap keberadaan Perkumpulan Guru Ngaji (PGN) yang sangat pro-pemerintah bentukan Bupati Tasikmalaya Wiradadaha.

Pada tahun 1950-an, Tasikmalaya adalah basis Masyumi dan Darul Islam (DI). Sementara Masyumi bergerak secara konstitusional di jalur formal, sehingga di kota ini memenangkan Pemilu 1955 dan pemilihan lokal 1957, DI lebih memilih pertempuran bersenjata. Oleh karena itu, Tasikmalaya pada periode ini penuh kontradiksi. Pada satu sisi masyarakatnya, aktif membangun perekonomian, tetapi pada sisi lain kondisi keamanan, terutama di pedesaan, sangat tidak aman.

Pada masa Orde Baru, kekuatan-kekuatan ekonomi politik Islam dikendalikan secara ketat oleh pemerintah. Seperti juga di tempat lain, Golkar memenangkan pemilu secara berturut-turut, meski di daerah kota PPP masih sangat kuat pada Pemilu 1971 dan 1977 PPP masih mempertahankan dominasinya. Namun terutama sejak para kyai beralih ke Golkar, kemenangan partai penguasa tersebut tidak terbendung lagi. Dan seperti juga di tempat lain, pengaruh militer dalam perpolitikan Tasikmalaya selama Orde Baru sangat terasa. Pada periode itu hampir semua bupati berasal dari militer, biasanya bekas komandan kodim 0612 Tasikmalaya, atau didrop dari atas.

Selepas berakhirnya Orde Baru, berdasarkan UU No. 10 Tahun 2001, Tasikmalaya bersama dengan beberapa daerah lainnya "dimekarkan" sebagai bagian dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi. Proses pemekaran berjalan relatif mulus karena sebelumnya telah terdapat kota administratif (kotif) Tasikmalaya yang dibentuk berdasarkan PP. No. 22 Tahun 1976 yang terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Cipedes, Cihideung, dan Tawang. Kota Tasikmalaya yang dibentuk pada 2001 meneruskan Kotif Tasikmalaya

yang telah ada sebelumnya, tetapi dengan tambahan 8 kecamatan baru.

Setelah pemekaran pada 2001, pusat pemerintahan kota dan kabupaten pindah ke lokasi baru yang jaraknya tidak terlalu berjauhan. Hal ini agak menyimpang dari rencana awal yang menghendaki pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya berlokasi di daerah selatan yang selama ini dianggap kurang diperhatikan oleh program pembangunan. Namun ternyata pusat pemerintahan kabupaten dibangun di Mangunreja yang bisa ditempuh setengah jam perjalanan dengan kendaraan bermotor dari pusat kota. Sementara itu, pusat kegiatan pemerintahan kota dibangun di lokasi baru, sekitar 2 kilo meter dari lokasi lama. Bekas kantor bupati dan DPRD kabupaten lama belakangan dihancurkan untuk dibangun taman kota.

Oleh karena itu, meskipun secara formal telah dimekarkan, hubungan sosial, ekonomi, dan politik antara kota dan kabupaten tetap berada di kedekatan geografis yang sama. Apa yang dimaksud sebagai kota dalam pengertian sosiologis tetap mengacu pada area di sekitar Jalan KHZ Mustofa di mana di sana berdiri pusat perbelanjaan paling lengkap. Hingga sekarang, kabupaten tidak memiliki kota dalam pengertian itu, sehingga penduduk kabupaten tetap berbelanja kebutuhannya ke toko-toko di sekitar Jalan KHZ Mustofa itu. Di area ini pula kegiatan-kegiatan publik dilakukan, seperti acara *car free day* setiap dua minggu sekali. Oleh karena itu, kecuali untuk urusan administrasi pemerintahan, hampir tidak ada perubahan tata kota yang berarti pasca-pemekaran.

Meski demikian, dalam hal orientasi keagamaan, kota dan kabupaten memiliki karakter sosio-kultural yang agak berbeda. Di daerah kota, organisasi Islam modernis seperti Muhammadiyah, Persis, dan Persatuan Umat Islam (PUI)

mempunyai basis kuat. Muhammadiyah memiliki sebuah kompleks sekolah menengah yang luas di Jalan Rumah Sakit, juga Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya di Gobras, Tamansari. Persis setidaknya mempunyai 2 pesantren dengan fasilitas sekolah yang lengkap dari tingkat menengah pertama hingga atas, yaitu di Jalan Benda dan Cempakawarna. Sementara PUI yang berbasis di Cicurug mempunyai beberapa sekolah besar di daerah itu.

Sementara itu, daerah kabupaten cenderung lebih berkarakter tradisional. Secara kultural mereka dekat dengan tradisi Nahdlatul Ulama (NU). Di sana terdapat beberapa pesantren besar, seperti Cipasung, Sukahideng, Sukamanah, Suryalaya, dan Manonjaya. Pesantren-pesantren besar ini melahirkan para alumnus yang membuka pesantren-pesantren yang lebih kecil di berbagai pelosok Tasikmalaya. Sekarang pesantren-pesantren itu umumnya mengelola juga pendidikan formal yang menarik ribuan santri/siswa dari berbagai daerah. Di Cipasung dan Suryalaya bahkan berdiri beberapa sekolah tinggi dalam berbagai disiplin keilmuan yang menerima para mahasiswa dari berbagai daerah, termasuk dari luar Tasikmalaya. Perlu dicatat juga Suryalaya adalah pusat Tariqoh Qadiriyyah Naqshabandiyyah (TQN) terbesar di Indonesia. Para ikhwan yang tergabung dengan tarekat ini berjumlah puluhan ribu orang. Pesantren ini juga mempunyai Pondok Inabah yang terkenal sebagai tempat rehabilitasi pecandu narkoba. Pada masa Orde Baru, Suryalaya di bawah pimpinan alm. KH Shohibul Wafa Tajul Arifin (Abah Anom) adalah pendukung Golkar yang paling awal di antara pesantren-pesantren Tasikmalaya lainnya.

Sementara itu, Miftahul Huda Manonjaya adalah pesantren yang didirikan oleh Alm. KH Choer Affandi dan sekarang kepemimpinannya diteruskan

oleh anaknya, KH Asep Maoshul Affandi. KH Choer Affandi adalah tokoh DI pada masanya. Dia bahkan pernah menjabat Bupati DI untuk wilayah Ciamis. Namun menjelas kekalahan Kartosuwiryo pada awal tahun 1960-an, Choer Affandi turun gunung dan menyatakan bergabung ke pihak republik (TNI). Pada tahun 1967 dia mendirikan pesantren Miftahul Huda yang fokus pada pengajaran ilmu-ilmu ushuluddin. Kodam Siliwangi lewat Jenderal Ibrahim Adjie membantu pembangunan pesantrennya. Pada awal tahun 1970-an, dia sempat bergabung ke dalam Gabungan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI) yang kemudian menjadi sayap Islam Golkar pada masa awal Orde Baru. Hubungan antara pesantren Miftahul Huda dan pemerintah, khususnya militer, telah terbina cukup lama (Wawancara dengan KH Asep Maoshul Affandi, 15 Mei 2016, di Tasikmalaya).

Pengaruh Pesantren Miftahul Huda dalam perpolitikan Tasikmalaya hari ini sangat kuat. Bupati Kabupaten Tasikmalaya sekarang, Uu Ruzhanul Ulum, adalah cucu dari alm. KH Choer Affandi. Dengan memanfaatkan jaringan alumni pesantren (Hamida) yang kompak, dia berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya. Pemimpin pesantrennya yang sekarang, KH Asep Maosul Affandi, adalah anggota DRPR dari PPP selama dua periode. Di wilayah kota pengaruh mereka bersifat tidak langsung, yaitu terutama melalui para "ajengan bendo" yang sebagian besar adalah alumni pesantren ini. Para ajengan bendo adalah aktor-aktor penting dibalik fenomena konservatisme keagamaan Tasikmalaya belakangan ini.

Konservatisme Keagamaan

Dari kilasan konteks Tasikmalaya di atas kita bisa melihat bahwa fenomena konservatisme keagamaan

dan intoleransi di Tasikmalaya di era sekarang ini mempunyai pijakan historis dan sosiologis yang kuat. Namun cukup pasti fenomena tersebut muncul kembali dengan intensitas yang terorganisasi pada akhir tahun 1990-an seiring dengan menguatnya pembayangan Tasikmalaya sebagai “kota santri” (*Amarah Tasikmalaya: Konflik di Basis Islam*, 1998). Hal ini terkait dengan kebangkitan Islam politik sebagai identitas lokal yang dimotori oleh sekelompok kiai yang kemudian terkenal sebagai ajengan bendo karena pakaian khas yang dikenakannya.² Mereka aktif berceramah dengan kritik sosial politik sebagai tema pokoknya. Mereka berbicara di hadapan publik mengenai kegagalan Orde Baru dan kemungkinan Islam sebagai solusi atas kegagalan itu. Namun mereka tidak lagi berbicara “negara Islam”, melainkan “syariat Islam”. Di tengah era transisi pada masa itu, mereka dengan cepat memperoleh tempat dan pengaruh di tengah masyarakat.

Peristiwa kerusuhan Tasikmalaya 1996 adalah momentum kebangkitan sentimen Islam politik tersebut. Peristiwa itu sendiri dipicu oleh hal sepele. Seorang santri yang merupakan anak polisi dihukum oleh guru ngajinya di Pesantren Riyadul Ulum Wadda’wah, Condong. Tidak terima atas perlakuan itu, si bapak yang polisi itu memanggil si guru ngaji anaknya di kantornya, Polres Tasikmalaya. Namun kabar yang beredar menyebutkan si bapak menyiksa si guru ngaji. Tidak menunggu lama setelah kabar beredar, ribuan orang terkumpul di kota, berdemonstrasi di depan kantor Polres. Namun tidak lama kemudian demonstrasi itu berubah menjadi aksi perusakan, tidak hanya terhadap kantor Polres, tetapi juga terhadap gereja-gereja dan toko-toko milik penduduk keturunan Tionghoa. Peristiwa ini sendiri bersamaan dengan serangkaian kerusuhan di

² Mereka terdiri dari KH Asep Maoshul Affandy, KH Miftah Farid, KH Tb. Miftah Fauzi, KH Didi Abdul Madjid, KH Mahfud Sidik, KH Amang Baden, KH Jenjen, KH Abdul Jabbar, KH Azid Affandy

Rengasdengklok, Situbondo, dan kota-kota lain pada masa akhir Orde Baru (*Amarah Tasikmalaya*, 1998).

Dalam peristiwa kerusuhan tersebut, isu ketidakadilan ekonomi dimunculkan. Berhembus kesan bahwa para pengusaha keturunan Tionghoa telah mengambil alih posisi para pengusaha pribumi. Pengusaha keturunan Tionghoa seolah-olah dianakemaskan, sedangkan para pengusaha pribumi seakan-akan dianaktirikan. Kesan ini dikontraskan dengan narasi-narasi tentang kemajuan ekonomi para pengusaha pribumi di masa lalu. Dari sini sentimen rasisme dikembangkan, dicampur dengan sentimen agama yang kental.

Padahal kenyataannya beberapa sentra industri kecil milik para pengusaha pribumi tetap berkembang di beberapa kawasan. Salah satunya adalah di Kawalu. Di kawasan ini terdapat puluhan perusahaan konveksi dan bordir yang berkembang sejak tahun 1970-an. Area pemasaran dari industri kecil di kawasan sangat luas, termasuk Pasar Tanah Abang. Namun harus diakui sebagian bahan baku, seperti kain, diperoleh dari toko-toko dan distributor pengusaha keturunan Tionghoa. Dalam bertransaksi, mereka sering menggunakan jaminan tanah. Di tengah fluktuasi harga bahan baku, para pengusaha pribumi sering merugi. Hutang dibayar oleh lahan. Dari kasus-kasus seperti inilah isu ketidakadilan ekonomi mendapatkan justifikasinya (Wawancara dengan KH Tb. Miftah Fauzi, 18 Mei 2016, di Tasikmalaya).

Politisi yang paling berhasil memanfaatkan situasi transisi di Tasikmalaya adalah Tatang Farhanul Hakim. Dia adalah Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dia menjabat ketua DPRD Tasikmalaya hasil Pemilu 1999. Dengan baik dia memanfaatkan kekecewaan publik terhadap Orde Baru untuk menggembosi dominasi Golkar yang telah berkuasa pada pemilu-

pemilu sebelumnya. Di tangan dia pula para ajengan bendo dikonsolidasikan, sehingga kelak mereka akan menjadi juru kampanye PPP yang handal. Hasilnya, PPP memenangkan Pemilu 1999. Dua tahun berikutnya, Tatang terpilih menjadi Bupati Kabupaten Tasikmalaya pasca-pemekaran.

Kemunculan para ajengan bendo menandai kelahiran gerakan-gerakan Islam lokal Tasikmalaya yang dalam beberapa hal terkait dengan konstelasi nasional. Watak keagamaan mereka bercorak konservatif. Gerakan-gerakan ini timbul tenggelam mengikuti konstelasi politik lokal yang sangat dinamis dan, terutama lagi, figur kepemimpinannya. Salah satu gerakan yang pernah mencuat adalah Brigade Thaliban pimpinan KH Jenjen yang juga termasuk kalangan ajengan bendo. Gerakan ini sangat aktif menyuarakan “amar ma’ruf nahyi munkar” dengan mengadakan aksi-aksi *sweeping* terhadap objek-objek yang dianggap sebagai sarang kemaksiatan. Mereka juga rajin menggalang dukungan bagi pemberlakuan syariat Islam lewat peraturan daerah. Namun setelah pimpinannya meninggal pada 2013, pamor gerakan ini menurun. Belakangan muncul gerakan yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat dan Aktivis Muslim Tasikmalaya (Al-Mumtaz) yang berdiri pada 2014 (Wawancara dengan Ust. Asep Sofyan, 23 Mei 2016, di Tasikmalaya). Gerakan ini, seperti terlihat dari namanya, merupakan aliansi dari beberapa organisasi Islam yang ada, seperti FPI, Jamaah Ansharu Shariah, Brigade Thaliban, dan lain-lain. Pimpinan gerakan ini mengklaim bahwa salah satu tujuan pendiriannya adalah untuk mengawal pelaksanaan Perda N0. 9/2014 tentang tata nilai di Kota Tasikmalaya. Mereka mau memastikan apakah perda tersebut direalisasikan atau tidak. Salah satu aksi mereka adalah penghentian paksa acara *New Look Model Competition*

2015 di sebuah mal yang dianggap hanya pamer aurat.

Berbeda dengan ormas Islam yang lebih besar dan mapan, seperti NU dan Muhammadiyah, gerakan-gerakan Islam lokal Tasikmalaya adalah fenomena kontemporer yang menjangkarkan ideologinya pada imajinasi historis setempat. Mereka membayangkan gerakannya sebagai kelanjutan dari gerakan serupa di masa lalu. Namun dalam hal ini terdapat sedikit keragaman. Setidaknya mereka mencari geneologi gerakannya pada eksistensi Sarekat Islam, Masyumi, dan Darul Islam di masa lalu Tasikmalaya.

KH Tb. Miftah Fauzi, sekarang menjabat Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Tasikmalaya, berpendapat bahwa sesungguhnya Tasikmalaya adalah kota SI atau SDI. Dia menolak pandangan bahwa Tasikmalaya adalah kota DI atau Masyumi. Jika melihat sejarah Tasikmalaya pada awal abad ke-20, demikian katanya, kita akan melihat peranan para haji yang sangat kuat. Mereka adalah pengusaha dan sekaligus penyebar Islam yang sangat gigih. Menurut Miftah Fauzi, model gerakan seperti inilah yang seharusnya sekarang direvitalisasi sebagai rujukan gerakan-gerakan Islam masa kini (Wawancara dengan KH. Tb Miftah Fauzi, 18 Mei 2016, di Tasikmalaya).

Sementara itu, Asep Deni Bumaeri, Ketua Persatuan Umat Islam (PUI) dan juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Tasikmalaya, menyatakan bahwa bagaimanapun Masyumi yang merupakan partai politik terkuat di kota ini pada tahun 1950-an masih tetap berpengaruh hingga kini. Meski terpecah-pecah ke dalam berbagai partai politik, seperti PBB, PKS, PAN, PPP, dan bahkan Golkar, imajinasi mengenai kemenangan Masyumi di masa lalu tetap hidup di kalangan Muslim modernis perkotaan. Hingga kini kekuatan mereka tetap besar

(Wawancara dengan Asep Deni Adnan Bumaeri, 16 Mei 2016, di Tasikmalaya).

Pandangan yang menyebut bahwa Tasikmalaya adalah basis DI berasal dari KH Asep Maoshul Affandy. Pimpinan Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya, dan juga anggota DPR RI dari PPP ini menyatakan bahwa impian untuk menegakkan syariat Islam tidak pernah surut. Pada masa lalu hal itu berusaha diwujudkan oleh DI melalui aksi bersenjata, tetapi hal itu tidak diperlukan lagi. Dia menambahkan bahwa sekarang penegakan syariat Islam bisa dilakukan melalui kerangka hukum yang berlaku, seperti perda syariah (Wawancara dengan KH. Asep Maoshul Affandi, 15 Mei 2016, di Tasikmalaya).

Meski berbeda pandangan mengenai geneologi gerakan Islam lokal, mereka sepakat bahwa penerapan syariah melalui peraturan daerah adalah konstitusional, apalagi dalam sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia sekarang. Di Tasikmalaya, mereka berargumen, Muslim adalah mayoritas, maka mereka mempunyai kesempatan untuk mengartikulasikan aspirasinya. Dalam sejarah, mereka menambahkan, Islam justru selalu melindungi kaum minoritas sejauh mereka mengikuti konsensus yang berlaku.

Kepala Kesbangpol Kota Tasikmalaya, Deni Diyana, membagi ormas-ormas Islam di Tasikmalaya ke dalam 3 kelompok, yaitu: *Pertama*, ormas dakwah, yaitu ormas-ormas besar yang lingkupnya nasional, seperti NU dan Muhammadiyah. Mereka telah mempunyai program kerja yang tersusun, sehingga justru kurang aktif menanggapi isu-isu lokal yang berkembang. *Kedua*, ormas amar ma'rif nahyi mungkar. Kelompok kedua ini bersifat lokal. Mereka rajin mengadakan sweaping ke tempat-tempat yang dianggap menjual alkohol atau menyediakan prostitusi. Bagi pihak Kesbangpol, kelompok ini

memang kadang merepotkan karena sesungguhnya tidak mempunyai kewenangan formal untuk melakukan itu. Namun mereka pun dinilai merupakan "mitra" pemerintah dalam menegakkan ketertiban, sehingga komunikasi dengan tokoh-tokohnya terus dijalankan. Brigade Taliban, FPI, Al-Mumtaz, bahkan HTI dikategorikan masuk ke kelompok ini. *Ketiga*, ormas salafi jihadis. Kelompok ini adalah sumber terorisme yang berbahaya. Pemerintah mengawasi gerak-geriknya. Di Tasikmalaya, kelompok ini terutama terkait dengan murid-murid Abu Bakar Ba'asyir yang terindikasi, menurut pengamatan Deni Diyana, berhubungan dengan ISIS (Wawancara dengan Deni Diyana, 17 Mei 2016, di Tasikmalaya).

Sementara itu, pihak kepolisian memang merasa bahwa pada satu sisi keberadaan gerakan-gerakan Islam lokal itu merepotkan. Aksi sweaping yang sering mereka lakukan sesungguhnya bertentangan dengan aturan, sebab hal itu adalah kewenangan kepolisian. Polisi juga menerima pengaduan keberaatan atas tindakan itu, misalnya dari pengusaha hotel dan hiburan malam. Akan tetapi, pada sisi lain polisi menganggap gerakan-gerakan Islam adalah "mitra" dalam menjalankan program keamanan dan ketertiban masyarakat. Beberapa yang dianggap teroris memang menjadi objek perhatian mereka, seperti sebuah kelompok pengajian di daerah Karanganyar yang diduga terkait dengan Abu Bakar Ba'asyir. Namun secara umum keberadaan gerakan-gerakan Islam lokal dinilai bukan masalah bagi kepolisian (Wawancara dengan Aiptu Ibnu, 16 Mei 2016, di Tasikmalaya).

Perda Syariah

Salah satu sorotan yang terus menerus diarahkan kepada Tasikmalaya adalah keberadaan regulasi bernuansa religius atau sering disebut "perda

syariah". Secara definitif memang tidak ada perda dengan nama perda syariah, tetapi beberapa peraturan daerah memang secara jelas mengekspresikan semangat syariat di dalamnya. Sejumlah tokoh agama dan politik setempat bangga dengan pencapaian itu. Adanya perda syariah menunjukkan bahwa Tasikmalaya adalah kota santri.

Di wilayah kabupaten, perda syariah mengacu pada Perda No. 13/2001 tentang rencana strategis Kabupaten Tasikmalaya "yang religius/Islami sebagai pusat pertumbuhan di Priangan Timur serta mampu menempatkan diri menjadi kabupaten yang maju di Jawa Barat pada tahun 2010". Namun segera setelah itu visi ini mendapatkan beragam kritik, sehingga diganti menjadi "Tasikmalaya yang religius/Islami sebagai kabupaten yang maju dan sejahtera serta kompetitif dalam bidang agribisnis di Jawa Barat tahun 2010". Tidak lama setelah terbitnya perda ini, keluar pula Surat Edaran No. 451/SE/Sos/2001 tentang upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan dan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 13/2003 451/Se/04/Sos/2001 tentang persyaratan memasuki jenjang pendidikan SD, MI, SMP, dan MTs yang dipandang sebagai implementasi dari visi religius/Islami tersebut.

Ketika itu semua partai politik di DPRD Kabupaten Tasikmalaya menyetujuinya. Tatang FH sebagai bupati merasa tidak ada yang salah dengan perda dan keputusan tersebut karena tidak bertentangan dengan konstitusi (Wawancara dengan Tatang FH, 23 Mei 2016, di Tasikmalaya). Perda syariah tidak bertujuan membentuk negara Islam seperti diperjuangkan oleh Negara Islam Indonesia (NII) di masa lalu, tetapi hanya untuk mengakomodasi kelompok mayoritas Islam di Tasikmalaya. Tatang menganggap hal itu wajar saja, sebab di tempat lain di mana mayoritasnya non-Islam, hal serupa juga terjadi. Semuanya,

dia menambahkan, tetap dilakukan dalam kerangka NKRI. Lebih lanjut Tatang menceritakan bahwa penetapan visi religius Islami tidak mengecilkan sama sekali kalangan non-Islam, sebab kata religius di sana mengacu pada semua agama. Dia cukup paham bahwa hak-hak kewarganegaraan yang berlaku bagi semua warga negara tidak boleh dikesampingkan.

Akan tetapi, Tatang FH mengakui bahwa kepentingan untuk menyatukan kelompok-kelompok Islam adalah alasan utama di balik penetapan perda tersebut. Penyatuan ini penting sebagai landasan bagi stabilitas pemerintahannya. Meski berasal dari latar belakang NU, Tatang berupaya merangkul semuanya. Usahanya menghimpun para ajengan bendo justru dilakukan dalam rangka mencegah kecenderungan radikal mereka. Dia selalu menekankan agar semua pihak menempuh jalan persuasi daripada konfrontasi.

Mengenai kelompok minoritas dalam Islam, seperti Ahmadiyah, Tatang berpendapat bahwa masalah itu tidak akan pernah selesai sejauh tidak ada ketidaktegasan pemerintah pusat. Namun dia menyadari adanya dilema dalam perkara tersebut. Sebagai kepala daerah dia pernah mengalaminya. Pada satu sisi dia diminta mengikuti pandangan ulama yang menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah sesat, tetapi pada sisi yang lain dia tahu bahwa sebagai kepala daerah dia harus berdiri netral. Untuk mengatasi dilema itu, dia hanya bisa meminta kepada para ulama agar menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu mengajak kembali Ahmadiyah ke jalan Islam.

Dukungan terhadap perda syariat datang dari gerakan-gerakan Islam lokal yang merasa bahwa Tasikmalaya sekarang berada dalam kemerosotan moral. Kalangan ini merasa bahwa Tasikmalaya kota santri hanyalah jargon yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Bagi mereka, apa yang disebut sebagai “penyakit masyarakat”, seperti narkoba, prostitusi, dan HIV/AIDS hanya bisa disembuhkan dengan agama (Wawancara dengan KH Aminuddin Busthomi, 17 Mei 2016, di Tasikmalaya). Oleh karena itu, agama harus diformalisasikan ke dalam peraturan daerah untuk membentengi masyarakat Tasikmalaya dari kemerosotan moral lebih jauh lagi.

Di wilayah kota, mengikuti saudara tuanya di kabupaten, tuntutan akan suatu perda syariah terus digalakkan sejak awal. Salah satu pendukung awalnya adalah KH. Tb Miftah Fauzi (Wawancara dengan KH. Tb Miftah Fauzi, 18 Mei 2016, di Tasikmalaya). Dia mengumpulkan para tokoh agama dan politik untuk segera merealisasikan hal itu. Baginya, hampir sama dengan pendapat Tatang FH, perda syariah beda dengan negara Islam. Negara Islam sudah gagal, sedangkan perda syariah adalah peluang yang bisa digunakan oleh umat Islam di era demokrasi sekarang. Perda syariah, apapun namanya, tetap berada dalam bingkai konstitusi dan NKRI. Akhirnya lahir Perda No. 12/2009 tentang “pembangunan tata nilai kemasyarakatan yang berlandaskan pada ajaran agama Islam dan norma-norma sosial masyarakat Tasikmalaya”. Perda ini ditandatangani oleh Syarif Hidayat, Walikota Tasikmalaya periode itu, yang berasal dari PPP.

Akan tetapi, Kementerian Dalam Negeri di bawah Menteri Gamawan Fauzi ketika itu sedang giat-giatnya merevisi perda-perda bermasalah. Dia memanggil walikota ke Jakarta untuk merundingkan perda tersebut (Wawancara dengan Syarif Hidayat, 21 Mei 2016, di Tasikmalaya). Dia meminta perda tersebut direvisi. Kata-kata “Islam” diminta dihapus karena suatu kebijakan publik seharusnya berlaku bagi semua, bukan hanya penduduk Muslim. Selanjutnya, 5 tahun kemudian, lahir Perda No. 7/2004 yang

merupakan pengganti Perda No. 12/2009. Kata-kata “Islam” telah dihapus. Judulnya digantung menjadi Perda tentang “tata nilai kehidupan masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya”. Kata-kata dan kalimat-kalimat yang menyebutkan “Islam” secara khusus tidak dijumpai lagi, tetapi setelah diselidiki secara seksama substansinya kurang lebih sama.

Tidak lama kemudian, melalui Keputusan Walikota Tasikmalaya No. 467.2/Kep.147-Kesbangpol/2005, Walikota Tasikmalaya, Budi Budiman, membentuk “tim koordinasi penerapan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius di Tasikmalaya”. Ketua tim dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, tetapi wakilnya adalah KH Amang Baden, seorang eksponen ajengan bendo terkemuka. Tim ini mengklaim telah merangkul seluruh komponen ormas Islam, meski yang jelas tidak ada satu pun wakil dari kalangan non-Muslim di dalamnya. Namun dalam kenyataannya, tidak semua kelompok Islam diikutsertakan dalam proses pembuatan perda tersebut. KH Didi Hudaya, Ketua PCNU Kota Tasikmalaya, mengaku tidak pernah diundang dalam pembahasan perda itu, meski namanya tercantum sebagai salah satu penasehat tim perda tersebut. Dia juga tidak tahu persis apa yang diatur oleh perda tersebut. Dia melihat perda tersebut hanyalah bentuk akomodasi pemerintah terhadap kelompok-kelompok Islam garis keras (Wawancara dengan KH. Didi Hudaya, 11 Mei 2016, di Tasikmalaya).

Biaya pelaksanaan perda tata nilai tersebut dimasukkan ke dalam mata anggaran Kesbangpol Kota Tasikmalaya. Dalam pengakuan kepalanya, jumlahnya tidak banyak, hanya 300 juta rupiah per tahunnya. Sebagian besar anggaran itu digunakan untuk sosialisasi, termasuk kepada para pengusaha wisata agar melengkapi tempat usahanya dengan fasilitas ibadah yang memadai. Di

setiap kamar hotel, misalnya, harus tersedia kitab suci dan arah kiblat. Pada pokoknya tempat-tempat wisata di Kota Tasikmalaya harus mencerminkan diri sebagai bagian dari citra kota santri.

Kelompok Minoritas

Pihak yang tidak diuntungkan oleh menguatnya konservatisme keagamaan di Tasikmalaya adalah kelompok minoritas. Namun pengertian minoritas sekarang tidak lagi mengacu pada kelompok-kelompok non-Muslim. Segera setelah meletusnya peristiwa kerusuhan 1996, hubungan antar-agama dibina sedemikian rupa. Sejak itu tidak ada lagi kasus konfliktual yang melibatkan hubungan antar-agama. Memang ada beberapa ketegangan kecil akhir-akhir ini terkait dengan renovasi Gereja Katolik Hati Kudus Yesus, tetapi hal itu diyakini bisa diselesaikan melalui mekanisme Forum Komunikasi Umat Beragama dan Badan Musyawarah Antar Gereja (Rapat di Kantor Kesbangpol Kota Tasikmalaya, 17 Mei 2016).

Minoritas yang paling terkena dampak buruk dari menguatnya konservatisme keagamaan adalah kelompok di dalam Islam sendiri, khususnya Ahmadiyah dan kemudian Syiah. Dua kelompok ini mengalami tindakan intoleransi berkali-kali. Terhadap Ahmadiyah, tindakan tersebut bahkan berbentuk serangan fisik terhadap masjid, rumah, dan sekolah mereka. Terhadap Syiah, tindakan intoleransi sejauh ini berupa ujaran-ujaran kebencian di publik, belum sampai serangan fisik.

Kajian mengenai hal ini telah banyak dilakukan. Untuk Ahmadiyah, saya sendiri menulis beberapa artikel mengenai ini. (Mashudi Noorsalim, M. Nurkhiron, Ridwan al-Makassary (ed.), *Hak Minoritas, Multikulturalisme, dan Dilema Negara Bangsa*, 2007, 195-235; Amin Mudzakkir, "Minoritisasi Ahmadiyah

di Indonesia" 2011; Amin Mudzakkir, "Illegalisasi Ahmadiyah, Demokrasi Pancasila, dan Ketidakbebasan Sipil Politik di Indonesia", 2011; Cahyo Pamungkas (ed.), *Mereka yang Terusir: Studi tentang Ketahanan Sosial Pengungsi Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia*, 2016). Sedangkan mengenai Syiah juga ada tulisan Chiara Formichi, "Violence, Sectarianism, and the Politics of Religious Articulations of Anti-Shi'a Discourses in Indonesia" (Chiara, 2014, 1-27).

1. Ahmadiyah

Di Tasikmalaya, Ahmadiyah telah hadir sejak lama. Masjid Baitur Rahim yang berlokasi persis di depan kompleks Pondok Pesantren Cipasung dibangun pada tahun 1925. Pada tahun 1940, Maulana Rahmat Ali, penyebar awal Ahmadiyah di Indonesia, meresmikan Jemaat Ahmadiyah cabang Singaparna. Sejak itu Ahmadiyah berkembang di beberapa daerah di Tasikmalaya, seperti di Nagarawangi, Kawalu, Sukapura, dan Wanasigra.

Sejak 2003 hingga sekarang tercatat beberapa tindakan intoleran terhadap Ahmadiyah di Tasikmalaya. Peristiwa paling awal adalah pengrusakan masjid Ahmadiyah di Tolenjeng, Sukaratu, pada 5 April 2003. Peristiwa tersebut dipicu oleh provokasi Ahmad Hariadi, seorang mubalig Ahmadiyah yang kemudian berbalik menjadi seorang pembenci Ahmadiyah terkemuka, di sebuah acara pengajian di Cisayong beberapa waktu sebelumnya. Dia mengkampanyekan kesesatan Ahmadiyah yang pernah dianutnya. Terdorong oleh provokasi itu, tidak lama kemudian sejumlah orang menyerang masjid Ahmadiyah di Tolenjeng. Pihak Ahmadiyah memilih jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan ini, tetapi buntu. Aparat kepolisian tidak memproses kasus aduan tersebut lebih lanjut. Beberapa kalangan

masyarakat sempat melakukan advokasi hukum, namun pihak aparat hukum tidak menanggapinya. Kasus ini tidak pernah terselesaikan secara tuntas. Masjid yang rusak terbengkalai hingga sekarang.

Peristiwa selanjutnya terjadi pada bulan Juni 2003. Kasusnya dimulai dengan adanya permintaan pihak FPI untuk memindahkan Panti Asuhan Hasanah Kautsar di Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Keberadaan panti yang bisa menampung sekitar 40-an anak tersebut diprotes karena dianggap penyebaran Ahmadiyah di daerah itu. Berbekal surat pernyataan tokoh-tokoh setempat, panti asuhan itu disegel secara sepihak. Namun ternyata penentangan terhadap Ahmadiyah tidak berhenti sampai di sini. Dalam sebuah pertemuan dengan aparat pemerintahan di lingkungan Kecamatan Kawalu, MUI Kota Tasikmalaya berkesimpulan bahwa keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Cicariang adalah eksklusif, agresif, ekspansif, dan meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, MUI meminta agar kegiatan Ahmadiyah di Cicariang dihentikan selamanya.

Peristiwa seterusnya terjadi pada 19 Juni 2007. Pada bulan April 2007, pengurus Ahmadiyah menyelenggarakan sebuah acara bertajuk Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda). Acara ini dihadiri oleh para utusan cabang Ahmadiyah se-Jawa Barat. Pihak panitia mengaku telah melaporkan acara tersebut kepada aparat kepolisian untuk urusan perizinan, bahkan mereka juga mengundang beberapa tokoh keagamaan setempat. Acara berlangsung dengan lancar. Pada tanggal 19 Juni 2007, sekelompok orang beratribut FPI, Brigade Thaliban, dan Gerak (Gerakan Etika Rakyat Anti Korupsi) mendatangi dan merusak Masjid Mahmud, Singaparna, yang dijadikan tempat pelaksanaan Mukerda Ahmadiyah dua bulan sebelumnya.

Peristiwa paling parah terjadi pada 5 Mei 2013. Ratusan orang, sebagian

besar beratribut FPI, menyerang rumah, masjid, dan sekolah milik jemaat Ahmadiyah di Tenjowaringin, Salawu, Tasikmalaya. Desa Tenjowaringin dikenal sebagai desa Ahmadiyah, sebab dari 27 rukun tetangga yang ada di sana, 24 di antaranya adalah wilayah Ahmadiyah. Komunitas Ahmadiyah di sini termasuk yang terbesar di Indonesia. Jumlahnya ribuan. Dalam aksi penyerangan ini, sekitar 24 rumah, 1 masjid, dan 1 madrasah rusak parah.

Selain peristiwa-peristiwa tersebut, hingga kini akses anggota jemaat Ahmadiyah Tasikmalaya terhadap pelayanan publik tertentu masih dihambat, misalnya dalam pengurusan nikah dan ibadah haji. Hal ini terkait dengan instruksi dari pemkab dan pemkot Tasikmalaya sejak 2011 yang menjalankan program “pertobatan” bagi warga Ahmadiyah. Kepala Kemenag Kota Tasikmalaya mengungkapkan bahwa hingga sekarang sekitar 190 orang Ahmadiyah telah “kembali masuk Islam” (Wawancara dengan Ahmad Fatoni, 17 Mei 2016, di Tasikmalaya). Mereka bahkan dibina secara ekonomi melalui suatu program pemberdayaan berbasis dana CSR BRI yang dikelola oleh FPI. Kepala Kemenag mengatakan bahwa pihaknya telah mengantongi data anggota jemaat Ahmadiyah sebagai dasar pengawasan terhadap mereka. Dalam hal pengurusan nikah dan ibadah haji, pemkab dan pemkot Tasikmalaya akan melayani anggota Jemaat jika mereka menyatakan diri kembali masuk Islam dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Bagi pemerintah setempat, Ahmadiyah bukan Islam. Di Tasikmalaya, kebijakan yang diterapkan sejak Kementerian Agama dipimpin oleh Surya Dharma Ali itu ternyata masih berlanjut hingga sekarang.

Instruksi pemkab dan pemkot Tasikmalaya dinaungi oleh Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12/2011 tentang larangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah

Indonesia di Jawa Barat. Pergub ini secara tegas meminta para pengikut Ahmadiyah untuk kembali kepada Islam. Pergub juga mendorong para ulama untuk semakin aktif menjalankan peran dakwahnya terkait dengan keberadaan Ahmadiyah ini. Lahirnya Pergub ini, menurut kabar yang tersiar di media massa, difasilitasi juga oleh aparat keamanan (militer) melalui "operasi sajadah". Panglima TNI ketika itu, Moeldoko, membantahnya, meski di lapangan narasumber Ahmadiyah membenarkan bahwa memang pihak militer di tingkat bawah (koramil dan babinsa) ikut mensosialisasikan Pergub tersebut.

Lebih lanjut Pemkab dan Pemkot Tasikmalaya membentuk Ikatan Masyarakat Korban Aliran Sesat Ahmadiyah (IMKASA) sebagai wadah bagi mereka yang dinyatakan telah bertobat dan kembali kepada Islam. Terhadap mereka dijanjikan tidak hanya pembinaan keagamaan, tetapi juga bantuan ekonomi. Program ini dikatakan oleh Kemenag sebagai "kearifan lokal" yang memperlihatkan keberhasilan Tasikmalaya mengurus soal Ahmadiyah.

Gbr. 2. IMKASA



Sumber: koleksi pribadi Budi Badrussalam

Pihak Ahmadiyah mempunyai penjelasan lain mengenai pertobatan tersebut (Wawancara dengan Budi Badrussalam dan Ust. Jakfar, 18 Mei 2016, di Tasikmalaya). Menurut mereka, hal itu hanya akal-akalan pemerintah dan FPI saja. Kenyataannya hanya sekitar 13 anggota Jemaat yang keluar dari organisasi. Sebelumnya mereka memang

sudah tidak aktif lagi. Alasan ekonomi tampaknya menjadi pendorongnya. Mereka dijanjikan bantuan sebesar 5 juta rupiah, tetapi kenyataannya hanya diberi paket sembako terdiri dari 3 bungkus mie instan, satu kilogram gula pasir, dan 2 liter minyak goreng.

Memang terlihat ada masalah dengandayangdiklaimoleh pemerintah. Kementerian Agama menganggap bahwa jika ada seorang anggota Jemaat di satu keluarga, maka keluarga itu adalah keluarga Ahmadiyah. Akibatnya jumlah anggota Ahmadiyah membengkak, termasuk mereka yang dikatakan telah bertobat itu. Menurut pihak Ahmadiyah, mereka yang bertobat memang bukan anggota Jemaat, meski ada anggota keluarganya yang memang adalah anggota Jemaat. Hal ini terjadi, misalnya, pada Munawarman, mantan Ketua Khudam Ahmadiyah Priangan Timur yang tinggal di Sukasari, Tenjowaringin. Dalam data versi pemerintah, orang tua Munawarman dianggap Ahmadiyah, padahal di keluarga itu yang merupakan anggota Jemaat hanyalah Munawarman. Kasus salah paham data seperti ini banyak terjadi di Tenjowaringin.

Kalangan Ahmadiyah mempunyai strategi menghadapi hambatan pelayanan publik tersebut. Mengenai pernikahan, mereka akan melangsungkannya di Salawu. Di kecamatan ini, meski masih berada di wilayah administratif Kabupaten Tasikmalaya, petugas KUA-nya lebih responsif. Mereka tidak terlalu mempedulikan apakah yang datang ke sana untuk mengurus proses menikah adalah Ahmadiyah atau tidak. Hal ini tidak lepas juga dari hubungan personal yang telah terjalin sekian lama antara petugas KUA Salawu dan warga Ahmadiyah Tenjowaringin. Namun hal seperti ini sulit dilakukan di KUA-KUA lainnya. Di kecamatan yang ada lokasi pemukiman Ahmadiyahnya, petugas sudah dibekali

oleh data siapa saja anggota Jemaat di wilayahnya. Mereka yang termuat dalam data akan diminta untuk “masuk Islam” terlebih dahulu kalau mau menikah secara Islam. Akibatnya beberapa anggota Jemaat terpaksa pindah alamat dulu ke Salawu atau ke kabupaten/kota lain agar bisa menikah secara resmi.

Dalam hal ibadah haji, warga Ahmadiyah hingga kini masih dihalang-halangi. Jika pernikahan ditangani oleh KUA kecamatan, urusan naik haji langsung dipegang oleh kantor kemenag kabupaten dan kota. Jika pada yang pertama pihak Ahmadiyah masih bisa mengatasi, pada yang kedua mereka sulit melakukannya lagi. Oleh karena itu, warga Jemaat yang ingin naik haji terpaksa harus daftar lewat kota atau kabupaten lain di luar Tasikmalaya. Beberapa, misalnya, berangkat dari Garut dan Bandung.

Mubalig Ahmadiyah di Tenjowaringin, Ust. Jakfar dan Ust. Firman, merasa bahwa hubungan sosial mereka dengan penduduk non-Ahmadiyah sekitarnya berjalan dengan baik sejak awal (Wawancara dengan Ust. Jakfar dan Ust. Firman, 18 Mei 2016, di Tasikmalaya). Secara ekonomi juga mereka merasa tidak ada jurang pemisah. Namun memang selalu ada usaha untuk mengganggu situasi itu. Salah satunya adalah dengan pendirian dua masjid besar, bernama Al-Aqsha 1 dan Al-Aqsha 2, di tengah-tengah pemukiman komunitas Ahmadiyah di Sukasari, Tenjowaringin. Masjid yang dibangun dengan bantuan dana dari Gubernur Ahmad Heryawan ini sering digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan anti-Ahmadiyah. Para peserta kegiatan tersebut berasal dari luar Sukasari. Di masjid inilah pada 2013 diadakan tablig akbar yang berbuntut pada penyerangan perkampungan Ahmadiyah Tenjowaringin beberapa hari setelahnya.

2. Syiah

Syiah adalah kelompok minoritas dalam Islam yang belakangan juga mendapatkan perlakuan diskriminatif. Di Tasikmalaya, kelompok ini terutama berhimpun dalam organisasi Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (Ijabi) yang didirikan di Bandung pada 2000 di bawah kepemimpinan Jalaluddin Rakhmat (Kang Jalal). Para penggerak organisasi ini di Tasikmalaya umumnya adalah mantan mahasiswa yang pernah berguru kepada Kang Jalal di Bandung, lalu mengembangkannya di Tasikmalaya. Mereka umumnya adalah para aktivis mahasiswa tahun 1980-an yang juga terpengaruh oleh bacaan-bacaan tentang revolusi Islam Iran pada masa itu.

Di Tasikmalaya sendiri, Syiah berkembang terutama di kalangan kampus. Ketua Ijabi Tasikmalaya saat ini, Komar, adalah aktivis HMI di Universitas Siliwangi pada tahun 1980-an (Wawancara dengan Komar, 22 Mei 2016, di Tasikmalaya). Dia bahkan pernah menjadi pengurus HMI hingga tingkat pusat. Dia mengaku mengikuti Syiah karena pencarian identitas diri. Keluarga besarnya terafiliasi dengan NU. Namun ketika mahasiswa, ketika kegelisahan tentang pencarian identitas diri memuncak, dia merasa membutuhkan suatu jalan keislaman yang lebih paripurna. Lalu dia menemukan pencarian itu melalui Syiah, terutama sejak membaca sebuah buku berjudul *Saqifah-Awal Perselisihan Umat* yang membahas perseteruan di kalangan Muslim pasca-meninggalnya Nabi Muhammad. Sejak itu dia semakin intensif mempelajari Syiah.

Jalan yang kurang lebih sama ditempuh juga oleh Edi Hendri, mantan ketua Ijabi Tasikmalaya (Wawancara dengan Edi Hendri, 22 Mei 2016, di Tasikmalaya). Pada tahun 1980-an dia adalah seorang aktivis mahasiswa di Bandung. Dia sering mendatangi pengajian Kang Jalal di daerah

Kiaracondong. Sekarang dia bahkan mengirim anak-anaknya untuk sekolah di Yayasan Muthahari, Bandung, yang dipimpin oleh Kang Jalal.

Menurut Komar, tidak ada yang berbeda antara Syiah atau pecinta ahlul bait dengan kelompok Muslim lainnya dalam hal peribadatan. Memang dia mengakui dalam konsep imamah terdapat perbedaan yang mendasar, tetapi baginya hal itu adalah sesuatu yang wajar. Perbedaan mazhab dalam Islam telah dikenal sejak awal. Memang Komar mengakui bahwa dalam Syiah terdapat setidaknya 5 tradisi yang diutamakan, yaitu asyura, nisfu Syaban, lailatul qadar, al-ghadir, dan doa khumail.

Pengikut Syiah di Tasikmalaya tidak banyak. Berdasarkan pengakuan Komar, jumlah anggota Ijabi kurang lebih 70 orang. Mereka umumnya tinggal di komplek perumahan di perkotaan. Sebagian tinggal di perumahan Taman Cilolohan Indah. Di masjid kompleks perumahan inilah Ijabi sering mengadakan acara. Latar belakang mereka cukup beragam, termasuk dalam hal pekerjaan. Komar, ketua Ijabi Tasikmalaya sekarang, misalnya, adalah kontraktor bangunan, sementara Edi Hendri, ketua sebelumnya, adalah dosen. Tokoh Syiah Tasikmalaya, Ado Komaluddin, adalah dosen FE Universitas Siliwangi. Dalam hal ini peran kampus memang penting. Di sinilah umumnya Syiah diperkenalkan.

Ketika berdiri pada tahun 2000, kalangan Syiah merasa tidak pernah mendapat penentangan dari masyarakat. Di Tasikmalaya, mereka menjalankan tradisinya secara rutin tanpa ada pihak tertentu yang mengganggu. Beberapa orang menyatakan ketidaksetujuannya, termasuk para tokoh agama setempat, tetapi hal itu tidak berlanjut pada aksi penentangan yang terbuka.

Namun belakangan kondisi berubah. Sejak Aliansi Nasional Anti-Syiah

(ANNAS) di Tasikmalaya dideklarasikan pada 25 Maret 2015, penentangan terbuka terhadap keberadaan Syiah meningkat tajam. Deklarasi ANNAS itu sendiri didukung dan dihadiri oleh tokoh-tokoh agama setempat, seperti ketua MUI Kota Tasikmalaya, KH Achep Noor Mubarak, dan ketua MUI Kabupaten Tasikmalaya, KH Ii Abdul Basith. Sementara itu, Ketua GP Ansor Kabupaten Tasikmalaya, Asep Muslim, menuduh panitia acara tersebut mencatat nama organisasinya. Dia mengatakan bahwa NU memang tidak setuju dengan Syiah, tetapi mempunyai cara berbeda dengan ANNAS menghadapinya.

Gbr. 3. Deklarasi ANNAS



Pihak yang sangat keras terhadap Syiah adalah MUI. Sekretaris MUI Kota Tasikmalaya, KH Aminuddin Busthomi memperlihatkan pamflet yang berisi kesesatan Syiah. Pamflet itu dibuat oleh MUI Pusat untuk disebarakan di daerah. Menurutnya, hal yang paling gawat dari Syiah adalah konsep imamahnya. Jika dikembangkan, KH Aminuddin menjelaskan, konsep tersebut merupakan dasar bagi tindakan makar. Oleh karena itu, menurutnya, Syiah adalah anti-NKRI. Pandangan ini dibenarkan pula oleh para pejabat pemerintah dan aparat kepolisian yang hadir dalam sebuah rapat koordinasi di Kantor Kesbangpol, Kota Tasikmalaya, pada Selasa, 7 Mei 2016. Mereka adalah

Kepala Kesbangpol, kepala Kemenag, Kasat Intel Polresta, Kasi Intel Kajari, Staf Intel Kodim, dan Staf BIN.

Gbr. 4. Pamflet anti-Syiah

Sumber: dokumen pribadi.

Ketua MUI Kota Tasikmalaya, KH Achef Mubarok, bahkan mengatakan bahwa Syiah lebih berbahaya daripada Ahmadiyah (Wawancara dengan KH. Achef Mubarok, 17 Mei 2016, di Tasikmalaya). Dia berpendapat bahwa Ahmadiyah sekarang sudah bukan ancaman lagi, apalagi setelah program “pertobatan” terhadap mereka yang dilakukan oleh Kemenag dianggap berhasil. Syiah dianggap berbahaya karena selain secara keagamaan sesat, secara politik juga dinilai mempunyai potensi makar. KH Achef Mubarok percaya bahwa kelak Syiah Indonesia akan membentuk khilafah yang berpusat di Iran.

Kenyataannya memang aksi-aksi penentangan terhadap Syiah semakin gencar dilakukan di Tasikmalaya. Menurut Komar, pihak yang paling aktif melakukan itu adalah Persatuan Islam (Persis). Bahkan sebelum ANNAS dideklarasikan, Persis melalui Sam Organizer telah mengadakan serangkaian kegiatan tablig akbar yang berisi penyesatan Syiah. Para pelajar sekolah Persis dikerahkan untuk melakukan demonstrasi anti-Syiah.

Meski demikian, Budhi Setiadi, Ketua Pemuda Persis Tasikmalaya, mengatakan bahwa Persis tidak

sepenuhnya menolak Syiah (Wawancara dengan Budhi Setiadi, 9 Mei 2016, di Tasikmalaya). Dia mengakui bahwa ada banyak kelompok dalam Syiah dan tidak semuanya bisa disebut sesat. Namun dia sendiri menyatakan belum melakukan kajian mendalam mengenai Syiah di Tasikmalaya, apakah mereka tergolong kelompok yang sesat atau tidak.

Gbr. 4. Kegiatan anti-Syiah



Sumber: koleksi pribadi

Tekanan terhadap kelompok Syiah terus dilancarkan. Sebuah acara seminar bertema empat pilar kebangsaan yang sejatinya akan diselenggarakan pada 21 Februari 2016 dibatalkan izinnya oleh Polresta Tasik. Acara yang digagas oleh Redi (*Respect and Dialogue*) ini akan mengundang salah satunya wakil dari pengurus Ijabi. Karena ada tekanan dari kelompok-kelompok anti-Syiah, termasuk FPI, pihak Polresta melarang kegiatan tersebut, padahal awalnya telah memberikan izin. Redi sendiri adalah komunitas lintas organisasi, tetapi umumnya terafiliasi dengan NU, seperti IPNU, Ansor, dan PMII.

Aliansi Masyarakat dan Aktivis Muslim Tasikmalaya (Al-Mumtaz) adalah organisasi yang juga menentang Syiah. Mereka tergabung dalam Annas. Ust. Asep Sofyan, bendahara organisasi ini, menyatakan bahwa Syiah sesat karena mereka mengkafirkan para sahabat. Dalam kasus di Syiria, Ust. Asep Sofyan melanjutkan, jelas sekali keterlibatan Syiah dalam menghancurkan umat Islam

Sunni. Pandangan ini diamini oleh Ust. Abu Hazmi, ketua Jamaah Ansaru Syariah Tasikmalaya. Bagi mereka berdua, Syiah adalah buatan Yahudi—Abdullah bin Saba’—yang sengaja dibentuk untuk menghancurkan Islam dari dalam.

Penutup

Tulisan ini telah memperlihatkan fenomena intoleransi dan radikalisme agama di Tasikmalaya. Meski mengemuka terutama sejak akhir tahun 1990-an, akar-akar fenomena ini mempunyai pijakan historis dan sosiologis yang kuat. Namun

di atas semuanya fenomena tersebut terkait dengan menguatnya Islam politik sebagai identitas lokal Tasikmalaya di era desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam praktiknya, intoleransi dan radikalisme agama tidak hanya melibatkan aktor-aktor masyarakat, yaitu gerakan-gerakan Islam lokal, tetapi juga negara. Seperti terlihat dalam pemberlakuan perda syariah, batas antara agama dan politik tidak jelas lagi. Dalam situasi ini, kelompok minoritas dalam Islam, yaitu Ahmadiyah dan Syiah, adalah pihak yang paling rentan dijadikan korban.

Bibliografi

- Al-Barbasy, Ma'mun Murod, "Islam dan Negara: Perdebatan dalam Pembuatan Syariat Islam di Tasikmalaya", *Afkaruna*, Vol. 12, No. 2, Desember 2016.
- Amarah Tasikmalaya: Konflik di Basis Islam* (Jakarta: ISAI, 1998)
- Buehler, Michael, *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activist and the State in Democratizing Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016)
- Formichi, Chiara, "Violence, Sectarianism, and the Politics of Religious Articulations of Anti-Shi'a Discourses in Indonesia," *Indonesia*, No. 98 (Oktober), 2014.
- Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2016 (Jakarta: Komnas HAM, 2016)
- Menchik, Jeremy, *Islam and Democracy in Indonesia: Toleration without Liberalism* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016)
- Mudzakkir, Amin, *Kaum Santri Kota: Pengusaha, Perubahan Ekonomi, dan Islam di Kota Tasikmalaya, 1930-1980-an*, Skripsi S-1, Jurusan Sejarah, FIB UGM, Yogyakarta, 2005
- , "Menjadi Minoritas di Tengah Perubahan: Dinamika Komunitas Ahmadiyah di Ciparay" dalam Mashudi Noorsalim, M. Nurkhiron, Ridwan al-Makassary (ed.), *Hak Minoritas, Multikulturalisme, dan Dilema Negara Bangsa* (Jakarta: Interseksi, 2007)
- , "Minoritisasi Ahmadiyah di Indonesia", *Masyarakat Indonesia*, Edisi XXXVII, No. 2, 2011;
- , "Illegalisasi Ahmadiyah, Demokrasi Pancasila, dan Ketidakbebasan Sipil Politik di Indonesia", *Renai*, Edisi Khusus 2011;

- , "Limbo Kewarganegaraan dan Kemungkinan Rekonsiliasi Kultural: Studi Pengungsi Syiah di Sidoarjo dan Ahmadiyah di Mataram" dalam Cahyo Pamungkas (ed.), *Mereka yang Terusir: Studi tentang Ketahanan Sosial Pengungsi Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia* (Jakarta: YOI, 2016).
- Suisanto, H. "Perda Syariat Islam dan Problematikanya (Kasus Tasikmalaya)", *Aplikasia*, Vol. VIII, No. 1, Juni 2007;
- Simun, Junaidi, "Marjinalisasi Minoritas Keagamaan dan Keyakinan di Tasikmalaya" dalam Negara di Bawah Bayang Otoritas Agama: Problematika Peran Negara dalam Menangani Intoleransi Keagamaan (Studi Kasus di Jawa Barat) (Jakarta: Imparsial, 2012)
- Van Bruinessen, Martin, "Mukadimah: Perkembangan Kontemporer Islam Indonesia dan "Conservative Turn" Awal Abad ke-21" dalam Martin van Bruinessen, *Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme* (Bandung: Mizan, 2014)
- , "Genealogies of Islamic radicalism in post-Suharto Indonesia", *South East Asia Research*, Vol. 10, No. 2 (2002).